

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dapat diibaratkan sebuah pohon, di masa kecil rawan terinjak jika tidak diberi penanda dan tidak dilindungi, semakin tumbuh membesar angin yang menerpa akan semakin kencang. Itulah yang dinamakan dengan permasalahan, yang juga terjadi di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia meliputi empat hal seperti yang diungkapkan Komar (2006, hlm. 57) bahwa “masalah pendidikan pada umumnya terdiri atas masalah pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi”. Sejalan dengan hal itu, Fattah (2009, hlm. 81) mengemukakan masalah pendidikan sebagai “persoalan yang rumit, kompleks, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif menyangkut masalah peningkatan, dan secara kualitatif bahkan lebih kompleks lagi, yaitu menyangkut mutu dan relevansi”. Permasalahan pendidikan pertama yang dihadapi Indonesia adalah pemerataan pendidikan. Indonesia sebagai negara berkembang, mulai memikirkan pendidikan warga negaranya secara mandiri semenjak kemerdekaan. Beberapa fakta sejarah justru menyebutkan Indonesia yang awalnya bernama Nusantara sudah memikirkan pendidikan sebelum kemerdekaan yang dipadukan dengan semangat kebangsaan merebut kemerdekaan ditandai dengan lahirnya Budi Oetomo, Taman Siswa, dan beberapa organisasi pemuda di berbagai pulau, hingga akhirnya memproklamasikan itikadnya dengan adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Pasca pembacaan teks proklamasi tahun 1945, genap sudah Indonesia menjadi negara yang merdeka yang memiliki hak dan kewajiban mengurus rumah tangga negaranya secara mandiri. Semua aspek ketatanegaraan mulai dibangun, termasuk pendidikan. Namun, Engkoswara (1999, hlm. 116) memiliki sedikit pandangan yang berbeda, ia menggarisbawahi tema dalam pemerintahan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid, sebagai presiden keempat, yakni “mulai saat ini seyogyanya memberikan prioritas pada sosial budaya sebagai dasar ketahanan nasional melalui wahana utama pendidikan yang baik”, setelah sebelumnya

mengutarakan pemerintahan 3 presiden sebelum itu hanya berfokus kepada politik dan ekonomi di tengah-tengah rakyat yang miskin dan juga berpendidikan rendah.

Santi Susanti, 2017

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PUTUS JENJANG PADA LULUSAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menyikapi pendapat yang berbeda tersebut, sebagai pembuktian, Indonesia sudah memerhatikan pendidikan sejak awal kemerdekaan dengan adanya kurikulum 1947 atau sering disebut dengan Rentjana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950 sebagai kurikulum pendidikan pertama Indonesia setelah terlepas dari kurikulum Belanda. Selain itu, tahun 1984, yakni pada masa pemerintahan presiden kedua Indonesia, ada program wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun yang disusul pada tahun 1994 dengan lahirnya wajib belajar 9 tahun. Sejalan dengan pembuktian itu, menurut Firmansyah dan Sumarno (2013, hlm. 200) “peningkatan program wajib belajar dari wajib belajar 6 tahun menjadi wajib belajar 9 tahun adalah menyiapkan anak-anak dan remaja untuk lebih siap bekerja secara produktif melalui bekal pendidikan”.

Seiring bertambahnya permasalahan pendidikan yang lain, pemerataan pendidikan hingga sekarang masih menjadi masalah yang serius dan penting. Dahulu, pendidikan dalam arti sekolah memang sulit diakses karena hanya orang-orang tertentu saja yang mampu dan boleh bersekolah. Namun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, artinya pendidikan harus dapat diakses semua warga negara Indonesia, tidak ada larangan lagi bagi warga negara Indonesia untuk bersekolah, semuanya berhak untuk sekolah tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, jenis kelamin, agama, dan keadaan geografis.

Kenyataannya, masih ada yang tidak bersekolah. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan warga negara Indonesia tidak bersekolah dan putus sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin (2012) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menarik kesimpulan:

Terdapat 6 faktor anak tidak bersekolah, yakni: jumlah beban tanggungan keluarga (28%), pendapatan orang tua (27%), anak bekerja (21%), anak tidak minat sekolah (16%), yatim piatu (5%), dan kesulitan akses menuju satuan pendidikan (3%). Terdapat 10 faktor penyebab anak putus sekolah usia 7-15 tahun, yakni: anak bekerja (29,48%), kawin muda (22,71%), malas (17,93%), berhenti sendiri (13,94%), ikut orang tua (5,98%), ekonomi orang tua (5,18%), bantu orang tua (2,39%), cacat fisik (1,20%), IQ rendah (0,80%), dan bolos (0,40%). (hlm. 26)

Penelitian lain dilakukan oleh Setiawan (2015, hlm. 1) yang menyebutkan “faktor penyebab anak putus sekolah di kelurahan Meranti Pandak karena faktor

kemauan sendiri 40,90% yang menjadi faktor dominan, faktor ekonomi keluarga 31,83% dan faktor lingkungan teman bermain 27,27%”.

Hasil dari dua penelitian tersebut menyebutkan faktor ekonomi adalah salah satu penyebab masih adanya warga negara Indonesia di beberapa wilayah yang tidak bersekolah. Jika ditelaah, seharusnya faktor ekonomi sudah bukan lagi alasan untuk tidak bersekolah, karena biaya pendidikan adalah kewajiban pemerintah bahkan minimal dua puluh persen dari APBN dan APBD dialokasikan untuk kepentingan pendidikan nasional. Bantuan pendidikan yang digulirkan pemerintah diantaranya BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yang menitikberatkan kepada bantuan sarana-prasarana penunjang pembelajaran di sekolah, ini dapat menjadi alasan karena BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs sudah merambah kepada bantuan siswa miskin secara personal akan tetapi belum secara personal untuk SMA; BSM atau Bantuan Siswa Miskin sebagai program bantuan berikutnya sudah masuk kepada bantuan secara personal untuk siswa miskin bahkan untuk mencegah putus sekolah dan menarik kembali siswa yang telah putus sekolah; dan program baru yang diberi nama Program Indonesia Pintar atau PIP, program ini merupakan program bantuan dana pendidikan bagi individu usia sekolah yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan biaya pendidikan, bantuan dengan penanda kartu yang diberi nama Kartu Indonesia Pintar ini dapat dimanfaatkan jika individu usia sekolah tersebut berada pada satuan pendidikan tertentu. Semuanya merupakan bantuan pendidikan untuk warga negara yang tidak mampu. Selain itu, program wajib belajar juga masih dilanjutkan sampai sekarang.

Permasalahan pendidikan yang tengah dihadapi Indonesia ini ternyata dialami pula oleh negara lain, bahkan telah dilakukan penelitian lebih dahulu. Tiga penelitian yang berkaitan dengan pengulangan kelas dan putus sekolah bahkan dilakukan oleh Rumberger pada tahun 1987, 1995, dan tahun 2001. Dua penelitiannya menjelaskan bahwa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi melalui individu dan lembaga (Rumberger, 1995; Rumberger, 2001). Identifikasi terhadap individu dilihat dari etnis, warna kulit, dan ekonomi keluarga, sedangkan terhadap lembaga dilihat dari status sekolahnya apakah itu berbasis agama atau sekolah negeri yang tidak begitu mengedepankan pelajaran agama. Rumberger (1987,

hlm. 101) mengelompokkan hal penting yang perlu diteliti berkaitan dengan putus sekolah yakni, *“the issues are grouped into four areas covering the incidence, causes, consequences, and solutions to the problem”*. Hal itu menjadi pendorong dalam melakukan penelitian di tahun 2001 mengenai apa yang harus dilakukan untuk menyikapi permasalahan putus sekolah yakni dengan menghilangkan kesenjangan ras dan etnis, namun jawaban untuk hal itu adalah ungkapan “tidak dapat dilakukan” di Amerika Serikat menjadi kekecewaan tersendiri dalam penelitiannya tersebut.

Penelitian yang dapat dikatakan telah lampau pula dilakukan oleh King, Orazem, dan Paterno (1999, hlm. 0) yang menyimpulkan *“... that enrollment decisions are heavily influenced by student academic performance in the previous year, and that promotions that are uncorrelated with merit have a negligible impact on school continuation”*. Hal itu, hampir mirip dengan penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Sweeting dan Muchlisoh (1998, hlm. 26) dalam Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan yang menyimpulkan *“tingginya angka mengulang kelas, putus sekolah, dan rendahnya angka melanjutkan dari SD (Sekolah Dasar) ke SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) disebabkan oleh dua alasan, rendahnya performan atau prestasi anak pada tes akademik dan rendahnya penghasilan keluarga”*.

Satu hal yang membedakan penelitian di tahun berturut-turut itu, penelitian Sweeting dan Muchlisoh mengidentifikasi orang tua peserta didik memiliki ketakutan ketika anaknya melanjutkan sekolah maka anaknya tidak mau membantu bekerja di daerah tempat tinggalnya bahkan anaknya ingin meninggalkan daerahnya untuk berangkat ke kota, sedangkan penelitian King, Orazem, dan Paterno di Pakistan justru mengidentifikasi orang tua akan mengusahakan anaknya untuk tetap sekolah jika prestasi akademiknya meningkat.

Pemerataan pendidikan formal atau pendidikan di sekolah selalu dikaitkan dengan Angka Partisipasi Kasar atau APK dan Angka Partisipasi Murni atau APM yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerataan pendidikan. Pusat Data dan Analisa Pembangunan (2016) mengungkapkan:

Angka Partisipasi Kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan

tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Berbagai instansi pemerintahan mulai dari instansi pendidikan hingga instansi pembangunan sesungguhnya saling bekerjasama mengentaskan masalah ini. Pendataan secara berkala selalu dilakukan untuk memantau keadaan pendidikan. Data dari Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan yang baru-baru ini beralih nama menjadi Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisis Potensi Daerah di Provinsi Jawa Barat, mengacu kepada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat APK SD/MI sederajat kabupaten dan kota se-Jawa Barat tahun 2015-2016 telah mencapai lebih dari 100%, sedangkan untuk data APM berada diantara angka 90%-100% kecuali dua kabupaten baru yang masih berada di rentang 77%-89%. Data APK untuk SMP/MTs sederajat kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2016 berada pada rentang 90%-108%, sedangkan APM 70%-93%.

Salah satu kabupaten yang memiliki APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs sederajat cukup baik adalah Kabupaten Majalengka. APK Kabupaten Majalengka untuk jenjang SD/MI sederajat tahun 2015-2016 adalah 109,01%, dan APM 96,35%. Jenjang SMP/MTs sederajat, APK Kabupaten Majalengka tahun 2015-2016 adalah 100,36% dan APM sebesar 82,54%.

Keberhasilan wajib belajar 9 tahun berdasarkan data-data tersebut memang cukup menggembirakan, namun, di balik itu masih ada sesuatu yang tersembunyi dengan adanya jumlah lulusan SMP/MTs sederajat yang tidak melanjutkan sekolah. Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka adalah salah satu kecamatan penyumbang lulusan SMP/MTs sederajat yang tidak melanjutkan sekolah di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dari Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisis Potensi Daerah Provinsi Jawa Barat, yang diambil dari 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah se-Indonesia, lulusan SMP/MTs sederajat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka 5 tahun terakhir yang tidak melanjutkan sekolah berjumlah 172 individu.

Keberlangsungan wajib belajar 9 tahun ternyata tidak hanya sampai kepada pencapaian hasil terselenggaranya wajib belajar 9 tahun saja, akan tetapi

melahirkan wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun memang telah diajukan sejak 2004 silam, namun sampai sekarang belum ada peraturan yang menetapkan wajibnya program itu untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan rintisan wajib belajar 12 tahun masih belum dapat tercapai dengan optimal. Majalengka sebagai salah satu penyumbang lulusan SMP/MTs sederajat yang tidak melanjutkan sekolah, berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistika Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki APK SMA/MA/SMK sederajat 63,44% dan APM 43,20% pada tahun 2016, bahkan Badan Pusat Statistika menunjukkan data lima tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data APK dan APM SMA/MA/SMK Sederajat Kabupaten Majalengka
Tahun 2011-2015

	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
APK	65,82%	55,53%	68,38%	70,34%	60,69%
APM	45,24%	46,88%	56,33%	59,15%	48,68%

Sumber: <http://jabar.bps.go.id>

Data tersebut menunjukkan bahwa APK dan APM di Kabupaten Majalengka masih fluktuatif. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Apakah yang menyebabkan masih banyaknya angka putus jenjang pada lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Majalengka?

Teknologi pendidikan sebagai sebuah studi dan praktik tidak hanya berkaitan dengan alat atau produk langsung, akan tetapi mengambil peranan dalam proses dan sistem terutama di dalam pendidikan, baik pendidikan di dalam sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Sehingga, keberadaan putus jenjang pada lulusan Sekolah Menengah Pertama seharusnya menjadi perhatian teknologi pendidikan pula di samping merupakan perhatian pendidikan luar sekolah. Teknologi pendidikan dapat berperan untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dan mendesain program pendidikan seperti apa yang diperlukan oleh mereka agar akses pendidikan tetap dapat dirasakan dengan kemudahan dan sesuai dengan kebutuhan. Cakupan studi teknologi pendidikan

secara lebih jelas dirangkum dalam lima kegiatan utama yaitu mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, serta mengevaluasi sebuah program.

Beberapa penelitian yang pernah dipelajari, peneliti belum menemukan penelitian yang terfokus di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka mengenai faktor-faktor penyebab putus jenjang pada lulusan Sekolah Menengah Pertama mengingat penelitian yang pernah dilakukan di daerah lain lebih banyak kepada angka mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama saja. Selain itu, penelitian lebih banyak dilakukan oleh penggiat sosiologi dan ilmu tentang kemasyarakatan sehingga tidak banyak mengambil peran dalam analisis desain program yang diperlukan sebagai tindak lanjut penelitian. Sehingga berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut, dan penelitian ini diberi judul **"Faktor-Faktor Penyebab Putus Jenjang pada Lulusan Sekolah Menengah Pertama"**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dalam beberapa rumusan masalah.

1) Rumusan Masalah Secara Umum

Masalah pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: "Faktor-faktor apakah yang menyebabkan lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka mengalami putus jenjang?"

2) Rumusan Masalah Secara Khusus

Berdasarkan permasalahan umum di atas, didapat beberapa rumusan masalah secara khusus sebagai berikut:

- a) Bagaimana profil umum lulusan Sekolah Menengah Pertama yang mengalami putus jenjang di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka?
- b) Bagaimana profil umum lingkungan tempat tinggal lulusan Sekolah Menengah Pertama yang mengalami putus jenjang di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka?
- c) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan putus jenjang pada lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang bersumber dari internal?

- d) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan putus jenjang pada lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang bersumber dari eksternal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini dapat dipaparkan menjadi dua macam yakni tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab putus jenjang pada lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mendeskripsikan profil umum lulusan Sekolah Menengah Pertama yang mengalami putus jenjang di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
- 2) Mendeskripsikan profil umum lingkungan tempat tinggal lulusan Sekolah Menengah Pertama yang mengalami putus jenjang di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor internal yang menyebabkan putus jenjang pada lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
- 4) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor eksternal yang menyebabkan putus jenjang pada lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian diuraikan dalam dua jenis yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber bacaan untuk memperkaya pengetahuan terutama dalam hal yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan putus jenjang pada lulusan Sekolah

Menengah Pertama di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, serta pendapat orang tua terhadap anaknya yang putus jenjang. Selain itu, sebagai dasar untuk memberikan gambaran identifikasi dalam mendesain program yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak dari penyebab yang ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber bacaan untuk mahasiswa Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan bahwa ranah analisis dan penelitian teknologi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta yang dekat kaitannya dengan hal itu. Akan tetapi, analisis terhadap pendidikan di luar sekolah berkenaan dengan analisis faktor penyebab putus jenjang dan kaitannya dengan kajian lima kawasan teknologi pendidikan yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sebuah program perlu untuk dimunculkan. Lulusan salah satu satuan pendidikan tertentu yang mengalami putus jenjang masih memiliki kesempatan untuk tetap belajar baik di dalam sekolah maupun di luar pembelajaran di sekolah dengan melihat faktor penyebab yang memengaruhinya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu bahan diskusi dalam perkuliahan ke depan terkait peran teknologi pendidikan di luar pendidikan formal atau persekolahan.

1.4.2.2 Bagi Instansi Pemerintahan terutama Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Manfaat bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan untuk mempertajam analisis masalah pendidikan yang terjadi di lapangan sehingga solusi yang diambil lebih bermanfaat. Analisis dilakukan agar kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan lebih mengarah kepada kebutuhan di lapangan dan tidak bertolak belakang dengan karakteristik objek analisis. Manfaat hasil penelitian untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda dapat dijadikan sebagai data tambahan untuk deskripsi terhadap lulusan Sekolah Menengah Pertama yang tidak melanjutkan sekolah. Selain itu, bagi instansi pemerintahan secara umum, penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi bahwa keberadaan suatu permasalahan tidak hanya

menjadi tanggungjawab salah satu bagian, akan tetapi penggerakan semua bagian untuk bekerjasama dapat sangat efektif untuk mengentaskan masalah dalam bidang apapun termasuk dalam bidang pendidikan yang sampai saat ini masih menjadi masalah penting bagi negara Indonesia.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat umum lebih memerhatikan sekitarnya agar tercipta rasa empati dan saling mendukung untuk bersama-sama merasakan pendidikan secara formal. Karena keberadaan usaha pemerintah dalam menjalankan setiap program tidak akan sukses apabila dari lapisan masyarakat tidak memberikan dukungan terhadap setiap usaha tersebut.

1.4.2.4 Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi untuk mengembangkan variabel kajian dengan lebih spesifik dan dapat dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.

1.4.2.5 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan karya dan diharapkan tidak membuat peneliti puas sampai di sini, sehingga ke depannya lebih termotivasi untuk menggali permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan langkah yang tepat.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penelitian skripsi ini disajikan ke dalam lima bab agar pembaca lebih mudah memahami pokok setiap pembahasan. Berikut adalah struktur organisasinya:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka tentang Faktor-Faktor Penyebab Putus Jenjang pada Lulusan Sekolah Menengah Pertama

Bagian ini memuat kajian pustaka dari berbagai sumber mengenai faktor penyebab putus jenjang yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, konsep belajar di luar sekolah, hingga penelitian terdahulu, posisi teoretis, asumsi penelitian, kerangka konseptual penelitian, dan definisi operasional.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini memuat desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bagian ini memuat hasil penelitian berkaitan dengan deskripsi hasil penelitian berdasarkan analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bagian ini berisi penutup yang disajikan ke dalam tiga bagian yaitu simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Selain itu, pada tahap akhir dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.